

UpNo : 03/GEN-MM/VI/2020
Lampiran : Kerangka Acuan dan Agenda
Perihal : Kerjasama Webinar Strategi Pengelolaan KKP

Kepada:

Yth. Direktur Pasca Sarjana UNIPA
Cq. Kepala Program Magister
Sumberdaya Akuatik

di

Manokwari

Dengan hormat,

Terjadinya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Dampak ini dirasakan baik oleh pengelola kawasan konservasi perairan maupun masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi tersebut. Untuk itu, Conservation Internasional (CI) Indonesia yang selama ini melakukan kegiatan pendampingan terhadap proses pengelolaan KKP di Papua Barat, bermaksud mengusulkan kerja sama dengan Pasca Sarjana - UNIPA untuk menyelenggarakan acara Webinar dengan tema "**Strategi Resiliensi Pengelolaan KKP terhadap Pandemi, Belajar dari Papua Barat**" pada bulan Juni 2020 ini (Kerangka Acuan dan agenda terlampir).

Bersama dengan Pasca Sarjana UNIPA, kami berharap dapat mendukung para pengambil kebijakan dalam memahami dan menyelesaikan isu-isu yang ada di tingkat kawasan. Dukungan teknis dan pembiayaan acara Webinar ini akan di dukung sepenuhnya oleh CI Indonesia. Untuk itu, Kami mohon nama-nama dosen dari Pasca Sarjana UNIPA untuk dapat berkoordinasi bersama dalam menyiapkan Webinar ini.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Bali, 5 Juni 2020

Hormat kami,



Meity Mongdong

Director Bird's Head Seascope

KERANGKA ACUAN WEBINAR
‘Strategi Resiliensi Pengelolaan KKP terhadap Pandemi, Belajar dari Papua Barat’
Juni, 2020

LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia memiliki prioritas utama untuk melakukan penanganan. Hal ini menyebabkan banyak program dan pendanaan pemerintah yang dialihkan untuk menekan laju penyebaran virus dan penanganan dampak COVID-19. Selain itu, pembatasan aktivitas dalam skala besar juga telah diberlakukan untuk masyarakat dan aparat pemerintahan demi menekan laju penyebaran virus. Hampir seluruh aktivitas untuk bekerja, belajar dan beribadah dilakukan dari rumah. Oleh karena itu, banyak aktivitas ekonomi yang menjadi tersendat di mana proses jual-beli terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan obat-obatan.

Kondisi ini berdampak sangat besar pada proses pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Mulai dari tersendatnya banyak proses administratif karena keterbatasan kerja akibat dari aturan *Work From Home (WFH)* atau bekerja dari rumah, longgarnya aktivitas pengawasan yang memicu maraknya pelanggaran dalam KKP baik di Papua Barat, bahkan pendanaan terhadap aktivitas pengelolaan Kawasan yang kemungkinan besar dikurangi atau bahkan di-*postpone*. Di Raja Ampat, Papua Barat, lumpuhnya industri pariwisata juga memunculkan problem baru misalnya penurunan *income* yang sangat drastis bagi pengelola KKP Raja Ampat dari jasa lingkungan. Padahal keberadaan industri dan aktivitas pariwisata (kapal-kapal wisata dan aktivitas lainnya) dalam Kawasan selama ini secara tidak langsung ikut berpartisipasi pada proses pengawasan. Keberadaan kapal-kapal dan aktivitas wisata ikut memantau jika terjadi aktivitas ilegal dalam Kawasan. Akibatnya, kekosongan aktivitas pariwisata selama pandemik juga meningkatkan kegiatan penangkapan ikan ilegal ataupun pelanggaran aturan Zonasi di dalam KKP.

Dengan demikian, tantangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) menjadi semakin besar. Namun, seharusnya aktivitas pengelolaan KKP tidak berhenti, seperti Pengelola KKP di Papua Barat yang tetap melakukan pengelolaan melalui strategi khusus. Karena pada saat yang sama, masyarakat nelayan masih tetap harus beraktivitas dalam KKP untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, aktivitas sektor perikanan masih tetap berjalan, masih banyak kapal-kapal penangkap ikan dari skala kecil hingga besar yang beroperasi di perairan Indonesia.

Kondisi ini menjadi menarik dan penting untuk didiskusikan oleh seluruh pihak yang memiliki kewajiban, kepentingan dan perhatian dalam pengelolaan KKP. Dibutuhkan rekomendasi strategi yang tepat dari berbagai pihak bagi pengelola KKP, agar pandemi tidak menghentikan aktivitas pengelolaan KKP. Hal inilah yang melandasi dirancangnya WEBINAR **“STRATEGI RESILIENSI PENGELOLAAN KKP TERHADAP PANDEMI, BELAJAR DARI PAPUA BARAT”**

TUJUAN

1. *Sharing* informasi dan pembelajaran tentang kondisi dan strategi adaptasi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Papua Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya saat terjadinya Pandemi COVID-19.
2. Melahirkan rekomendasi terhadap strategi *resiliensi* pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Pandemi

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan tujuan tersebut, output yang diharapkan adalah:

1. Adanya gambaran kondisi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Papua Barat khususnya dan di Indonesia umumnya dalam bertahan dan beradaptasi dari pandemi COVID-19.
2. Adanya poin-poin rekomendasi strategi bagi pengelola KKP dalam bertahan dan melakukan adaptasi pengelolaan dengan keberadaan pandemi

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan seminar ini direncanakan akan dilakukan pada

Hari : Selasa 23 Juni 2020

Waktu : 9.00-11.00 WIB atau 11.00 – 13.00 WIT

AGENDA KEGIATAN

Waktu (WIB)	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.50 - 09.00	Persiapan	Tim CI dan Program Magister Akuatik UNIPA
09.00 - 09.15	Pengantar Pembukaan	Direktur Program BHS CI & Direktur Pasca Sarjana UNIPA
09.15 - 10.15 (Narasumber @10 menit)	Narasumber I: DKP Provinsi Papua Barat Presentasi Panel I: “Pembelajaran dan adaptasi Pengelolaan KKP Papua Barat terhadap Pandemi”	Moderator
	Narasumber II: Prof. Jamaluddin Jompa Presentasi Panel II: “Resiliensi Kawasan Konservasi Perairan dari pandemi untuk tetap melindungi biodiversitas serta mampu menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan”	Moderator
	Narasumber III: Direktur KKHL – Kementerian Kelautan dan Perikanan Presentasi Panel III: “Adaptasi Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap pandemi”	Moderator
	Narasumber IV: Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Presentasi Panel IV: “Arahan Kelembagaan dan Kebijakan Penganggaran dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan agar resilien terhadap pandemi”	Moderator

	Narasumber V: Director BHS Program – Conservation International Indonesia Presentasi Panel V: “Upaya alternatif untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi di masa Pandemi COVID-19 dan setelahnya”	Moderator
10.15-11.00	Diskusi panel & simpulan	Moderator & Tim CI dan Program Magister Akuatik UNIPA

Rencana Pokok-pokok bahasan oleh para pembicara lebih detail dalam agenda di atas dijelaskan pada Lampiran 1.

MODERATOR

Beberapa calon moderator:

1. Pasca Sarjana - UNIPA
2. TBD

PLATFORM WEBINAR

- Microsoft Teams dari CI dengan kapasitas 200 orang atau
- Zoom dari Pasca Sarjana UNIPA dengan kapasitas 300-500 orang plus opsional: Live via YouTube Channel CI dan atau Pasca Sarjana UNIPA

PESERTA

Dalam kegiatan ini akan melibatkan:

1. KKP-KKHL
2. Direktorat PSDKP
3. Kemenpar
4. DKP Prop Papua Barat
5. UPTD-KKPD seluruh Indonesia
6. Conservation International Indonesia
7. WWF
8. TNC
9. Econusa
10. Jurnalis lingkungan nasional
11. Asosiasi Industri Wisata
12. Asosiasi HPI
13. Publik pemerhati isu konservasi perairan (undangan terbuka)

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan ini akan ditanggung oleh CI Indonesia

Lampiran 1. Rencana Pokok-pokok bahasan oleh para pembicara dalam Webinar “Strategi Resiliensi Pengelolaan KKP terhadap Pandemi, Belajar dari Papua Barat”

1. DKP Provinsi Papua Barat

“Pembelajaran dan adaptasi Pengelolaan KKP Papua Barat dimasa Pandemi”

Pokok pembahasan:

- Kondisi dan isu pengelolaan Kawasan konservasi Kaimana-Fakfak dan Raja Ampat pada masa COVID-19
 1. Isu Pariwisata:
 - Raja Ampat menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik secara sosial antar individu, menutup lokasi-lokasi tujuan wisata di seluruh Raja Ampat dan menerapkan larangan bagi masyarakatnya untuk bepergian ke kota Sorong dan mudik dari kota ke kampung-kampung tujuan di seluruh Raja Ampat. Kebijakan serupa diterapkan oleh PEMDA Fakfak dan Kaimana.
 - Penerapan kebijakan pembatasan jarak fisik sosial tersebut tidak segera diikuti oleh kebijakan jaringan pengamanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di kampung-kampung terurama yang selama 10 tahun terakhir telah mengalami perubahan dari nelayan tradisional lokal ke kegiatan jasa pariwisata.
 - Sebanyak 40 kapal yang mendapatkan ijin tetap dari PEMDA Raja Ampat dan kapal rekreasi wisata yang mendapatkan ijin single trip tidak mengoperasikan seluruh kapal. Nilai kerugian dari sector jasa kapal rekreasi diperkirakan mencapai 200 milyar rupiah.
 2. Isu Perikanan:
 - Hanya dalam waktu 2 minggu dari penerapan dimaksud, masyarakat kampung di sekitar Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat pada wilayah 1 KKP Selat Dampier dan wilayah 2 KKP Misol melaporkan telah terjadi pengarahagan bagan cumi maupun bagan ikan kedalam wilayah Taman Wisata Perairan – KKP Kep.Raja Ampat. Disamping bagan, beberapa kapal nelayan yang diperkirakan berukuran diatas 10 gross ton terindifikasi dugaan sementara melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah 1 KKP Selat Dampir, pada sector pulau Gam dan perairan sekitarnya.
 - Selain kegiatan penangkapan ikan dan pengarahagan bagan kedalam Kawasan Konservasi Perairan, kegiatan pembongkaran karang di KKP Kep.Ayau untuk pengambilan ikan hias dilakukan oleh sekelompok Masyarakat non local bekerja dengan seorang Masyarakat local kepulauan Ayau.
 3. Isu Pengelolaan:
 - Situasi mempertajam keterpurukan pada Badan Layanan Umum Daerah KKP Raja Ampat yang selama ini mengharapkan kontribusi jasa lingkungan dari adanya kegiatan wisata. BLUD UPTD KKP merumahkan sekitar 85% pegawainya terutama yang berada pada tingkat basis KKP. Hal ini disebabkan terjadi penurunan pendapatan dari 28 Milyar di tahun 2018 menjadi kurang dari lebih setengah pendapatannya saat ini.
 - Untuk Kawasan konservasi yang sedang dalam proses pembentukan badan pengelola, apakah harus dihentikan atau bisa dilanjutkan?
 - Ada pengalihan dana untuk pengamanan sosial masa COVID-19 sehingga dana operasional untuk pengelolaan Kawasan konservasi menjadi berkurang bahkan tidak ada

- Strategi yang sudah diambil dan dilakukan oleh pengelola Kawasan untuk meminimalisir dampak yang terjadi
 - o Apa yang sudah dilakukan untuk meminimalisir tantangan yang terjadi
 - o Dampak setelah penanganan

2. Jamaluddin Lompa

“Resiliensi Kawasan Konservasi Perairan dari pandemi untuk tetap melindungi biodiversitas serta mampu menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan”

Pokok Bahasan:

- Sejauh mana pandemi dapat berdampak pada kemampuan KKP dalam melindungi biodiversitas, dan mempertahankan perikanan dan pariwisata tetap berkelanjutan?
- Apa yang harus dilakukan/dimiliki pengelola agar KKP mempunyai daya tahan dan mampu beradaptasi dengan keberadaan pandemi?

3. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut/Direktur KKHL

“Adaptasi Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap pandemi”

Pokok pembahasan:

- Implementasi kebijakan (apa yang ingin/sudah dilakukan oleh KKHL) sebagai bentuk adaptasi atas pandemi yang terjadi
- Apakah kebijakan tersebut juga mengantisipasi pandemi di masa yang akan datang?

4. Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

“Arahan Kelembagaan dan Kebijakan Penganggaran dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan agar resilien terhadap pandemi”

Pokok pembahasan:

- Kebijakan kelembagaan dan penganggaran negara dalam mempertahankan sumberdaya alam Indonesia secara umum dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara lebih khusus.

5. Vice President atau Direktur BHS Program - CI Indonesia

“Upaya alternative untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi pada masa Pandemi COVID-19”

Pokok pembahasan:

- Pembelajaran dari pandemi ini, strategi NGO (atau stakeholder terkait) untuk untuk mendorong upaya pengelolaan KKP terutama untuk menjaga hubungan dengan masyarakatnya di lapangan dan contoh dari pengelolaan MPA di tempat lain world wide
- Strategi penanganan isu di lapangan: koordinasi, pengumpulan informasi dan sharing, bantuan teknis (Logistik),
- Strategi membangun trust Industri wisata terhadap penanganan pelanggaran perikanan di dalam KKP di Papua Barat
- Strategi pendanaan berkelanjutan: Blue Abadi Fund, Tantangan dalam pendanaan, Strategi pendanaan terhadap pengelolaan Kawasan konservasi selama masa pandemic dan setelahnya